

Tampil Di Bali Di Tengah Mencuatnya Isu Spionase

Bishop Bantah Canberra-Jakarta Retak Karena Kasus Penyadapan

Menteri Luar Negeri (Menlu) Australia Julie Bishop membantah retaknya hubungan Australia dengan Indonesia karena kasus spionase. Dia hadir di Bali Democracy Forum (BDF) 2013 dan akan menjadi pembicara.

BISHOP tiba di Bali, kemarin. BDF dibuka hari ini oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). BDF digelar pada 7-8 November. Forum ini dihadiri perwakilan dari 82 negara. Antara lain Sultan Brunei Hassanal Bolkiah dan Perdana Menteri Timor Timur Xanana Gusmao. Acara tahunan yang dibentuk pada 2008 itu, mempromosikan perkembangan demokrasi di kawasan Asia-Pasifik. Bishop akan akan berbicara dengan topik

Pembangunan dan Penguatan Kelembagaan Demokrasi.

Pernyataan Bishop menjelang kunjungan ke Tanah Air dimaksudkan untuk meredakan hubungan Canberra-Jakarta yang dalam beberapa hari terakhir ini berada di bawah tekanan, setelah adanya laporan penggunaan pos diplomatik untuk mata-mata atau pengumpulan informasi intelijen.

Masalah ini menyusul laporan yang mengutip dokumen dari bekas analis badan intelijen AS, Badan Keamanan Nasional (NSA) Edward Snowden, yang secara gamblang menyebutkan bahwa Australia dan Amerika Serikat melancarkan operasi penyadapan bersama pada Indonesia sejak 2007.

Jakarta marah dan mengatakan akan mengusulkan rancangan resolusi di Majelis Umum PBB guna meninjau ulang kerja sama bilateral dengan Australia. Meskipun mengakui kemarahan Jakarta, Bishop membantah hubungan telah menjadi retak.

"Saya tidak menemukan keretakan. Saya berharap memiliki



Julie Bishop

percakapan yang sangat produktif dengan Dr Nataliegawa (Menteri Luar Negeri Mary Nataliegawa) dan menteri Indonesia lainnya." "Dan saya juga tidak mau mengomentari masalah intelijen

ini dengan media. Kegiatan pengumpulan data dengan penyadapan adalah kegiatan kuno dan memerhatikan kami sudah tidak lagi menggunakan cara itu," ujar Bishop di Canberra, kemarin, sebelum berangkat menuju Bali.

"Kerja sama bilateral yang telah terjalin antara dua negara, seperti penyelundupan manusia dan kontraterorisme adalah kerja sama yang saling menguntungkan, dan itu akan terus dilanjutkan," ujarnya. ■ ABC/DAY



Kegiatan pengumpulan data dengan penyadapan adalah kegiatan kuno dan pemerintah kami sudah tidak lagi menggunakan cara itu

Washington & Canberra Sadap KTT PBB Perubahan Iklim Di Bali

Pemerintahan SBY Diminta Berani Pangkas Diplomat AS & Australia

Australia dan Amerika Serikat dikabarkan berkomploit untuk menyadap percakapan selama Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) PBB Soal Perubahan Iklim di Bali pada 2007. Pemerintahan SBY diminta mengambil sikap tegas atas kasus pelecehan diplomatik tersebut.

DIKUTIP *Guardian*, dalam dokumen yang diungkap bekas analis badan intelijen AS, Badan Keamanan Nasional (NSA), Edward Snowden, kegiatan penyadapan NSA dibantu Direktorat Sinyal Pertahanan (DSD) Australia.

Kabar ini jelas akan menambah buruk hubungan antara Jakarta dan Canberra, yang pekan lalu sudah mulai renggang setelah mendengar kabar Kedutaan Australia di Jakarta dijadikan salah satu pos penyadapan.

Kedutaan Besar Australia di Jakarta dan Beijing, China, dikabarkan merupakan salah satu pos aktif untuk penyadapan. Jakarta dan Beijing telah meminta penjelasan terkait dugaan ini.

Mengenai misi penyadapan di forum Perubahan Iklim di Bali 2007, disebutkan, pihak NSA dan DSD tidak berhasil melakukan misi dengan sempurna. Pihak intelijen AS dan Australia hanya bisa mengungkap nomor telepon para petinggi dan polisi yang bertugas di Bali.

"Tujuan mereka adalah untuk mendapatkan informasi lengkap



AFP/Photo.com/Anay

donesia kessal dengan tindakan AS dan Australia. "Ini merupakan langkah yang bisa diambil. Setelah itu, Indonesia bisa melakukan pertemuan hubungan diplomatik. Semua ini ada di tangan pemerintah Indonesia," lanjutnya.

Juwana memberi contoh Jerman dan Brazil telah mengungkap kemarahannya dengan mengusulkan draf resolusi terkait hak privasi ke PBB. "Apakah Indonesia akan semarah Jerman dan

Brazil," imbuhnya.

Menurutnya, hal itu menjadi pertanyaan besar. Sebab, keputusan pemerintahan SBY dibayangkan dengan ketergantungan Indonesia terhadap Australia dan AS, serta bagaimana kedua negara tersebut memaikan posisi lawan mereka terhadap Indonesia.

Sebelumnya, Presiden SBY melalui juru bicaranya Julian Aldrin Pasha, menyatakan bila penyadapan benar terjadi, Presiden akan menolak berkomentar

DISADAP:

Presiden SBY bersalaman dengan Perdana Menteri Australia Kevin Rudd saat itu menjelang KTT Perubahan Iklim PBB di Bali.

siden, meminta Menlu berkomunikasi dan melakukan klarifikasi ke pihak-pihak terkait.

Kabar disadapnya pemerintah Indonesia termuat dalam berita media Jerman *Der Spiegel* dan harian *Sydney Morning Herald* pada 31 Oktober.

Wakil Dubes AS Kristen Bauer telah dipanggil oleh Kemenlu untuk mengklarifikasi tuduhan tersebut. Namun dia menolak berkomentar atas kasus ini. ■ AP/DAY

Julie Bishop Dicecar Natalegawa Di Bali Democracy Forum

Menlu Bantah Lembek Hadapi Penyardapan AS & Australia

Meski tak berteriak lantang, Menteri Luar Negeri (Menlu) Marty Natalegawa menegaskan, Indonesia tidak lembek dalam menghadapi isu penyardapan yang diduga dilakukan Australia dan Amerika Serikat (AS).

KETEGASAN Indonesia meng-kaji ulang kerja sama intelijen dengan AS dan Australia, kata Natalegawa, juga bukanlah sikap yang lembek.

"Tidak ada yang lembek dalam menyatakan menentang memolok, menganggap *acceptable* (soal penyardapan). Tak ada yang lembek dalam menyatakannya protes keras," bantah Natalegawa di Bali Democracy Forum (BDF) VI di Nusa Dua, Bali, kemarin.

"Tidak ada yang lembek saat kita mensponsori resolusi PBB bersama Jerman dan Brazil untuk membatasi aksi-aksi seperti itu (penyardapan). Sikap kita tidak bisa dikatakan lembek," tekannya.

Menurut Natalegawa, dalam bahasa diplomasi, "mengkaji ulang" itu sangat penuh makna dan arti. "Proses terus bergulir sampai kita merasa ada titik penyelesaian. Kita juga berkomunikasi dengan negara lain yang menghadapi situasi serupa. Ini proses yang terus-menerus," terangnya.

Namun, meski telah mengeluarkan pernyataan keras, menanggapi AS dan Australia belum

nurut Natalegawa, jawaban kedua negara kepada sekitar 90 negara yang ditugaskan disadap sama saja. Tak mengaku, juga tak menyangkal.

"Yang tak kalah penting adalah memastikan sistem informasi dan komunikasi Indonesia makin diamankan, sehingga tak rentan terhadap gangguan," katanya.

Pada kesempatan yang sama, pertanyaan berubi-tubi dilayangkan kepada Menlu Australia Julie Bishop, terkait isu penyardapan yang diduga dilakukan Kedubes Australia di Jakarta usai pertemuan Natalegawa di BDF VI, kemarin.

Meski tak membeberkan detail isi pembicaraan dengan Natalegawa, Bishop mengaku, pihaknya menanggapi dengan serius isu dugaan kegiatan mata-mata di Indonesia.

"Kami menanggapi isu tersebut dengan sangat serius," tegas Bishop.

"Saya memastikan kepada Menlu Marty Natalegawa bahwa pemerintah PM Abbott tidak akan melakukan apapun yang akan merusak hubungan baik dengan Indonesia," imbuhnya.

Dia bilang, hubungan dengan



SALING MENATAP: Julie Bishop (kiri) bersama Presiden Timor Leste Xanana Gusmao di Bali Democracy Forum.

jakam luar negeri Australia. Dan hubungan Canberra-Jakarta masih baik dan tidak retak.

Namun, Bishop tak menanggapi saat ditanya apakah pihaknya dapat memastikan bahwa tindakan mata-mata tak akan dilakukan di masa depan. "Kami

tidak berwenang mengomentari masalah intelijen," ketinya. Dugaan penyardapan berasal dari dokumen yang dibocorkan

memiliki perjanjian berbagai intelijen yang dikenal dengan *Five Eyes*.

Kedubes Australia di Jakarta diklaim sebagai salah satu kedubes yang terlibat seperti dilaporkan media *Fairfax* Australia.

Selain itu, Kedubes Australia di Bangkok, Hanoi, Beijing dan Dili serta Komisi Tinggi di Kuala Lumpur serta Port Moresby, Papua Nugini, juga disebut terlibat.

Penyadapan Rusak Etika Diplomatik Pemerintah Wajib Protes Ke Australia & Amerika



Endriartono Sutarto

BEKAS Panglima TNI Jenderal (Purn) Endriartono Sutarto menyatakan Indonesia pantas melakukan protes keras terhadap Amerika Serikat dan Australia, jika kedua negara tersebut terbukti melakukan penyadapan.

"Indonesia juga hendaknya menyampaikan catatan diplomatik kepada PBB agar membuat aturan internasional yang melarang suatu negara melakukan penyadapan kepada negara lainnya," kata Endriartono saat dihubungi di Jakarta, kemarin.

Dia menegaskan, Indonesia harus berusaha membuktikan apakah benar atau tidak, Amerika Serikat dan Australia melakukan penyadapan kepada Indonesia. Pembuktian tersebut, kata dia, dengan meminta Edwards Snowden untuk menunjukkan bukti-bukti bahwa Amerika Serikat dan Australia melakukan penyadapan kepada Indonesia.

"Pemerintah Indonesia harus berusaha keras meyakinkan Edwards Snowden untuk menunjukkan bukti atau indikasinya," katanya.

Menurutnya, informasi adanya penyadapan yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Australia kepada Indonesia terbuka ke ruang publik dari pernyataan Edward Snowden yang dikutip beberapa harian terkemuka di Australia, pada pekan lalu.

Alumni AKABRI Darat tahun 1971 ini menilai, pernyataan Snowden tersebut cenderung benar karena hingga saat ini Pemerintah Amerika Serikat dan Pemerintah Australia tidak

melakukan bantahan serta gugatan kepada Snowden. Dari pernyataan Snowden, Australia melakukan penyadapan kepada Indonesia dari kantor Kedutaan Besar Australia di Jakarta.

"Jika benar Amerika Serikat dan Australia melakukan penyadapan kepada Indonesia, ini sudah melanggar etika diplomasi internasional," katanya.

Salah satu peserta konvensi calon presiden dari Partai Demokrat ini menjelaskan, kedutaan besar suatu negara di negara lainnya adalah perwakilan resmi negara yang memiliki hubungan diplomatik dan hubungan baik.

Menurut dia, jika kantor kedutaan besar digunakan sebagai tempat penyadapan ini sudah melanggar hubungan baik dan melanggar etika diplomasi internasional. Ia menambahkan, etika diplomasi internasional tidak membolehkan suatu negara melakukan penyadapan terhadap negara yang lainnya, apalagi jika dilakukan oleh kalangan diplomatik.

Panglima TNI pada periode 2002-2006 ini menilai, wajar jika suatu negara berkeinginan untuk mendapatkan data dan informasi dari negara lainnya tapi melalui cara terbuka dan legal. Seorang atase pertahanan di kedutaan besar, kata dia, memiliki tugas untuk mengumpulkan data dan informasi di negara tempatnya ditugaskan tapi harus dilakukan secara terbuka dan legal, seperti informasi dari pemberitaan media massa atau pembicaraan.

"Informasi itu tidak boleh dikumpulkan dari penyadapan," ujarnya.

Ketika ditanya apa upaya lain yang bisa dilakukan Pemerintah Indonesia untuk membuktikan penyadapan tersebut, Endriartono menjelaskan, Indonesia bisa melakukan kontra penyadapan oleh Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg), karena hal ini sudah menjadi tugas lembaga sandi negara.

"Saya belum tahu apakah, Lemsaneg sudah melakukan kontra penyadapan atau belum," ujarnya. ■ USU

Australia Seneuwen

Bilang Menyesal, Tapi Tak Mau Minta Maaf

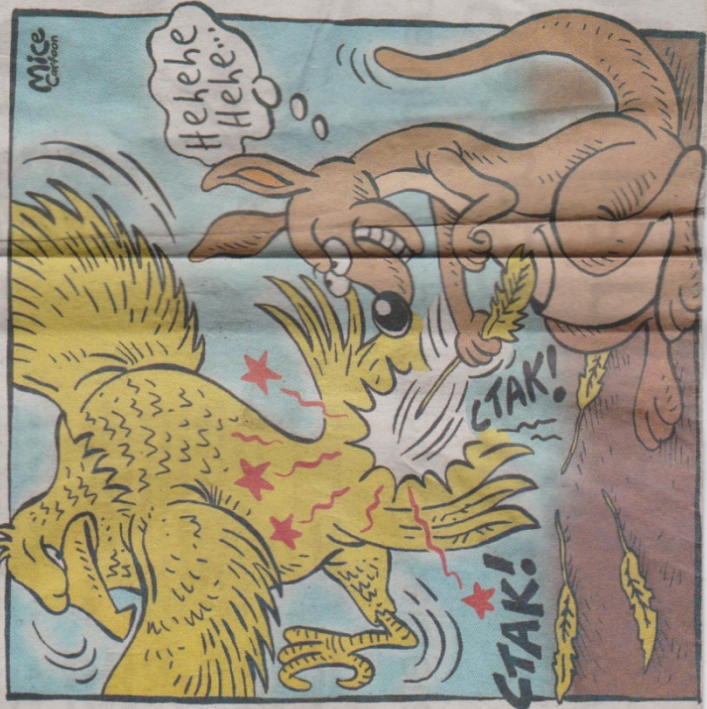
Australia bersilat lidah. Perdana Menteri (PM) Tony Abbott menyatakan penyesalan mendalam terhadap Presiden SBY, tapi dia tidak menyampaikan permohonan maaf.

SIKAP Australia yang seperti itu, ibarat orang seneuwen, yaitu saat ketahuan melakukan kesalahan, ia kelihatan gugup, bingung dan terkesan hilang akal. Tak tahu harus bilang apa, akhirnya hanya mengatakan, menyesal.

"Saya menyatakan penyesalan yang mendalam dan tulus atas ketidaknyamanan Presiden Yudhoyono, yang adalah sahabat Australia, mungkin salah satu sahabat terbaik yang dimiliki Australia di dunia," kata PM Abbott, kemarin. "Dan saya memantapkan bagaimana laporan itu menyakitkan secara pribadi bagi Yudhoyono dan keluarganya," tambahnya. "Saya mengakui bahwa sudah pernah muncul dugaan dan bahkan pengakuan di masa lalu mengenai masalah ini. Waktu itu, orang tidak bereaksi berlebihan dan saya tidak ingin bereaksi berlebihan sekarang," kata pemimpin Partai Liberal di Australia itu. "Saya berniat melakukan segala yang mungkin untuk membangun dan memperkuat hubungan dengan Indonesia, yang begitu penting bagi kedua negara," imbuh Abbott.

Media Australia terbelah menanggapi sikap Tony Abbott, News Corporation yang dipimpin dan diirikan Rupert Murdoch, membenarkan sikap Abbott. "Tindakan Abbott benar. Kita harus tegas,

♦ BERSAMBUNG KE HAL. 9



Presiden SBY Tanya Australia Mengapa Menyatakan Kawan, Bukan Lawan

TADI malam, Presiden secara resmi mengirim surat kepada Perdana Menteri Tony Abbott. Ada tiga hal yang disampaikan.

Pertama, Indonesia menunggu penjelasan dan pertanggungjawaban Australia atas kasus penyadapan itu. Kedua, sejumlah agenda kerja sa-



GELAR RAPAT: Presiden SBY bersama Menkopohum Menlu Marty Natalegawa & Dubes Indonesia untuk Australia Kesoema (paling kiri) menggelar rapat di Kantor Presi-

Australia Senewen

..... DARI HALAMAN 1

tapi kita harus menyelesaikan masalah ini dengan tenang," tulis *The Australian*.

Media berpengaruh itu malah menilai kemarahan SBY memperparah suasana. "Seharusnya masalah ini diselesaikan dengan kepala dingin, bukannya ucapan marah," sambung media itu seolah menyuruh SBY diam.

The Australian dan *Sydney Daily Telegraph*, pada 2004, pernah memuat wawancara dengan Hendropriyono, mantan Kepala Badan Intelijen Nasional (BIN). Saat itu, Hendro mengatakan, semua negara saling sadap. Jakarta diakui pernah menyadap telepon beberapa politisi Australia, kegiatan militer dan juga menyadap kedutaan besar Australia di Jakarta selama krisis Timor Leste pada 1999.

Jadi, tulis, *The Sydney Daily Telegraph*, "Tidak ada permintaan maaf pada 2004. Tentunya di 2013, (Australia) tidak perlu meminta maaf."

Namun, *The Sydney Morning Herald*, yang dimiliki Fairfax Group, menilai permintaan maaf perlu disampaikan, untuk menghindari balas dendam.

"Jika Abbott tidak minta maaf, akan mengacaukan hubungan kedua negara, yang kata Abbott, memiliki hubungan sangat penting dengan Australia," tulis *The Sydney Morning Herald*.

Koran tersebut juga melakukan *polling* atau jajak pendapat kepada pembacanya soal ketegangan hubungan Australia dan Indonesia. Apakah Australia harus meminta maaf karena sudah menyadap telepon Presiden dan Ibu Negara Indonesia? *Polling* ditutup 18 November 2013 dan diikuti 2.604 pembaca media tersebut. Hasilnya, sebanyak 59 persen menyatakan, Australia perlu minta maaf. Dan hanya 34 persen yang menjawab sebaliknya.

Pengamat hubungan internasional di Indonesia menilai, Australia telah bersilat lidah dan mengelabui Indonesia. "Tujuan mengelabui Indonesia agar tidak marah atas penyadapan yang sudah dilakukannya," ujar Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Prof Hikmahanto Juwono kepada *Rakyat Merdeka*, tadi

malam.

Hikmahanto yakin, Abbott tidak akan minta maaf. Sebab, kalau itu dilakukan, berarti Abbott mengakui kesalahan Australia. Sudah menjadi tradisi pemerintah Australia, jika ketahuan menyadap, mereka selalu menolak minta maaf.

"Saat bicara di depan parlemen Australia, dia meminta parlemen untuk tidak mendorongnya minta maaf. Sebab, penyadapan sudah merupakan kebijakan pemerintah Australia," jelasnya.

Di sisi lain, kata Hikmahanto, korban penyadapan Australia bukan hanya Indonesia. Kalau sekarang meminta maaf kepada Indonesia, Australia juga harus meminta maaf kepada negara lain. Itu tidak mungkin dilakukan Australia. Jadi, percuma Indonesia mengharapkan ada penjelasan dan permintaan maaf itu.

Hikmahanto menyarankan pemerintah bersikap lebih tegas. Memutus hubungan kerja sama militer dan meninjau berbagai kerja sama lainnya tidaklah cukup. Hal tersebut justru bisa menjadi bumerang bagi Indonesia.

"Bila Abbott tidak kunjung memberi penjelasan, apakah pemerintah Indonesia akan terus meningkatkan sikapnya? Bagaimana bila tensi menurun namun penjelasan tidak kunjung diberikan? Ini membuat Indonesia kehilangan muka. Karena itu, lebih tepat, usir saja Duta Besar Australia. Praktik diplomasi di negara lain juga begitu. Bila disadap, mereka mengusir diplomat negara penyadap tanpa ada tuntutan penjelasan atau menyampaikan maaf," jelas Hikmahanto.

Pengamat hubungan internasional CSIS Bantarto Bandoro mengatakan, bagi Australia, penyadapan adalah hal normal untuk mendapatkan informasi. Bantarto justru menyarankan Indonesia tidak perlu terlalu emosional. Kalau hubungan diplomatik diputus, akan rugi besar. Bukan hanya soal ekonomi, tapi dunia pendidikan juga kena imbas.

Mahasiswa Indonesia yang sedang belajar di Australia harus pulang bila hubungan diplomasi itu diputus. Bantarto menyarankan, Menlu dua negara bertatap muka di tempat netral dan membuat kesepakatan. ■ USU/MEL/NET

Australia Ternyata Tetangga Berbahaya



KEMESRAAN INI AKANKAH BERAKHIR? Presiden SBY memeluk Perdana Menteri Australia Tony Abbott, saat berkunjung ke Indonesia, beberapa waktu lalu.

Percakapan telepon Presiden, Ibu Negara dan sejumlah menteri ternyata disadap oleh intelijen Australia. Indonesia marah. Duta Besar Indonesia di Negeri Kanguru, Nadjib Riphat Kesoema, dipanggil pulang, kemarin. Dia diminta membawa baju dalam tas besar. Bukan tas kecil.

DEWAN menilai, Australia ternyata bukan tetangga yang baik, melainkan berbahaya.

Informasi tentang penyadapan dilontarkan oleh Edward Snowden,

Analisis Pakar

"Ini Waktunya Kita Marah..."

INDONESIA memang tidak bisa lepas dari Amerika dan Australia. Tapi, bukan berarti Indonesia diam saja atas aksi penyadapan yang dilakukan intelijen negara tersebut. Indonesia harus menunjukkan kemarahannya.

"Kalau waktunya marah, kita harus marah. Tindakan penyadapan itu telah melecehkan kita," tegas Pengamat Hubungan Internasional Prof Hikmahanto Juwana kepada *Rakyat*.

seorang mantan pegawai di Badan Keamanan Amerika Serikat (NSA) kepada *The Guardian*, harian berpe-

◆ BERSAMBUNG KE HAL 9

Merdeka, tadi malam.

Tindakan penyadapan tersebut, sama saja dengan menelanjangi Indonesia. Informasi rahasia Indonesia, baik soal kebijakan politik, kebijakan ekonomi, sosial, maupun kerja sama dengan negara lain jadi terbuka. "Ini sangat merugikan. Jurus kita sudah diketahui mereka. Semua kebijakan

◆ BERSAMBUNG KE HAL 9

Dubes RI Jangan Pulang Dengan Tas Kecil

Australia Ternyata

..... DARI HALAMAN 1

ngaruh di Inggris. Koran itu menyebut daftar pejabat tinggi Indonesia yang disadap oleh Intelijen Australia.

The Guardian mengutip sebuah *slide powerpoint* yang dikeluarkan Direktorat Sinyal Australia (ADS). Statusnya "top secret" atau sangat rahasia. Slide memaparkan nama pejabat dan jenis ponsel yang disadap. Di bagian bawah *slide* tertulis slogan Kementerian Pertahanan Australia: *Reveal their secrets - protect our own* (ungkap rahasia mereka dan jaga rahasia negara). Slide lainnya ada lagi. Judulnya *Indonesian President Voice Event*. Isinya, grafik data daftar telepon yang dihubungi dari ponsel Nokia E90, yang diklaim sebagai nomor Presiden SBY. Data itu diambil selama 15 hari pada Agustus 2009.

Selain SBY dan Ibu Ani, tujuh pejabat lainnya yang disadap adalah Wapres Boediono, mantan Wapres Jusuf Kalla, Dino Patti Djalal (saat itu Jubir Presiden), Hatta Rajasa, Sri Mulyani (mantan Menteri Keuangan), Widodo (mantan Menteri Menpolhukam), Sofyan Djajil (mantan Menteri BUMN).

Australia belum bereaksi atas kearahannya Indonesia. Stasiun televisi ABC menghubungi Perdana Menteri Australia Tony Abbott. Tapi, dia menolak mengomentari informasi penyadapan itu. Abbott tidak membenarkan,

tapi juga tidak membantah kabar tersebut. Di hadapan Parlemen, Abbott mengatakan, semua negara, termasuk Australia, melakukan pengumpulan informasi untuk keperluan negara.

"Semua pemerintahan pasti melakukan pengumpulan informasi. Tidak ada yang aneh," ujar Abbott, kemarin.

Indonesia bereaksi pedas terhadap Australia dan menuntut penjelasan. Staf Khusus Presiden Bidang Luar Negeri Teuku Faizasyah menyebutkan, penting sekali bagi Australia untuk meluruskan dan menjerihihkan situasi saat ini.

"Jika tidak segera diklarifikasi, di khawatirkan akan mengganggu hubungan Indonesia dan Australia," ujar Faizasyah.

Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha menyatakan, Presiden telah memerintahkan Badan Intelijen Negara (BIN) menelaah dugaan penyadapan oleh pemerintah Australia.

Wapres Boediono yang baru pulang dari Australia menyatakan, pemerintah RI dan Australia harus bersepakat tentang informasi intelijen agar tidak ada yang mengambil keuntungan sepihak.

"Tentunya kami sangat serius menanggapi isu ini. Harus ada jaminan agar tidak ada aksi intelijen dari satu pihak ke pihak lain," ujar Boediono.

Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa, yang mukanya lembut itu, kemarin, mengeluarkan kata-kata galak. Raut wajahnya tampak tegang dan

serius. Dia bilang, persahabatan Indonesia dengan Australia terbuka.

"Dulu Australia gambar-gambar agar menjunjung tinggi demokrasi. Kini, mereka lupa apa yang mereka ucapkan," sentil Natalegawa.

Dia meminta Dubes Kesoema pulang, untuk waktu lama. "Saya minta beliau tidak hanya membawa tas kecil," katanya. Di Jakarta, Menlu dan Dubes Kesoema akan bicara dan meninjau ulang hubungan Indonesia-Australia.

Natalegawa sempat mengundang Wakil Dubes Australia David Engel ke kantornya, kemarin siang. Hanya sekitar 20 menit. "Pembicaraannya baik. Lancar," ujarnya, singkat sebelum kembali ke kantornya.

Di DPR, reaksi keras bermunculan. Ketua DPR Marzuki Aliie menyarankan Presiden meminta penjelasan dari Australia dan Amerika. Sekaligus membangun kesepakatan baru secara bilateral dan komitmen untuk meningkatkan penyadapan.

Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq di *account twitternya* menulis, "Dengan terbuktnya penyadapan Aussie terhadap pejabat Indonesia jelas bahwa Aussie bukan tetangga yang baik dan bahkan berbahaya. Indonesia keliru memposisikan Aussie sebagai mitra strategis, karena ternyata Aussie memperlakukan pejabat Indonesia seperti ancaman."

"Jika itu benar terjadi, seharusnya

meninjau ulang semua bentuk kerja sama dengan Aussie. Bagaimana jika ada tetangga dekat justru mengintai dan mengintip tetangganya dengan diam-diam. Presiden SBY harus secara langsung bicara hal ini," kicaunya.

Wakil Ketua Komisi I DPR Agus Gumiwang Kartasasmita menilai, Australia bukan negara sahabat karena telah melakukan penyadapan. Menurutnya, Pemerintah RI bagus menarik Dubesnya, mengevaluasi kerja sama dan meninjau ulang hubungan diplomatik dengan Australia.

Anggota Komisi I DPR lainnya, Tjahjo Kumolo menilai, penyadapan telah mengobarkan semangat nasionalisme Indonesia dan memunculkan sentimen perlawanan terhadap keangkuhan Australia.

"Tidak patut Australia melakukan penyadapan, karena itu merendahkan kedaulatan bangsa, merendahkan harga diri sekaligus menodai tata karma dan etika pergaulan internasional," kata Sekjen PDIP itu.

Politisi Golkar Tantowi Yahya menuntut Australia meminta maaf kepada bangsa Indonesia. "Kalau memang tidak, ada ya dibantah dong, kalau tak mau bantah, ya minta maaf," imbuhnya.

Politisi Golkar Agung Laksono mempertanyakan, "Kurang baik apa Indonesia terhadap Amerika dan Australia? Masak masih disadap juga. Itu pelecohan." ■ USU/ONI/HPS/DAY

Sikap Australia Sangat Menjengkelkan

Tak Merasa Bersalah Malah Pancing Amarah

Usir Dubes Australia

Jangan Mengira Indonesia Takut

SUARA-suara agar Indonesia mengusir Dubes Australia makin mengkristal. Sejumlah anggota DPR dan masyarakat kebanyakan yakin, ini merupakan langkah yang tepat menyusul terboong-kannya skandal penyediaan yang dilakukan Negeri Kanguru itu. Jangan dikira Indonesia takut. Wakil Ketua Komisi I (bidang luar negeri) DPR Tubagus Hasanuddin yakin, Indonesia tetap akan berdiri meski memutuskan hubungan diplomatik dengan Australia. Menurut politisi PDIP ini, jumlah keuntungan Rp 15 miliar per-tahun yang didapat Indonesia dari hubungan dengan Australia merupakan jumlah yang tak berarti.

"Apalah arti Rp 15 miliar dibanding kehormatan kita," jelas Tubagus di gedung DPR, kemarin.

Selain itu, lanjut Tubagus, Indonesia juga punya dua kartu truf. Pertama, soal kerjasama penanganan terorisme dengan Australia. Negeri itu akan rugi jika Indonesia menghentikan suplai

• BERSAMBUNG KE HAL 9

KEHAMBANG/ANTARA



JABAT TANGAN: Presiden SBY menerima surat kepercayaan dari Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Malaysia untuk Indonesia Dato Seri Zahraim Mohamed Hashim di Istana Merdeka, kemarin. Pada kesempatan ini Presiden juga menerima penyerahan surat kepercayaan dari enam duta besar negara lain.

Seperti T
Dia Mas

PROTES dan kecaman
langan di Indonesia sepe
berpengaruh berarti bag
tralia. PM Australia deng
mau minta maaf, meski m
adanya penyadapan terse



Gubernur Papua Lukas E
Greg Moriarty di kantor P

Sikapi Penyesuaan, Menlu Pake Jurus Keran

Tak Merasa
..... DARI HALAMAN 1

Presiden SBY bicara tegas soal kasus penyesuaan yang dilakukan intelijen Australia dan Amerika Serikat. Melalui akun twitter pribadinya, SBY mengatakan akan meninjau ulang kerja sama dengan Australia. Negara tetangga itu dinilai telah menyakiti Indonesia.

Celotehan pertama SBY diunggah pukul 00.04 WIB. Melalui akun @SBYudhono, Presiden menegaskan, Indonesia sudah melayangkan protes keras atas penyesuaan yang dilakukan Australia dan Amerika Serikat.

Menurutnya, Menteri Luar Negeri (Menlu) Marty Natalegawa dan jajaran pemerintah tengah melakukan langkah diplomasi sambil meminta penjelasan dan klarifikasi dari kedua negara tersebut.

"Sejak ada informasi penyesuaan AS dan Australia terhadap banyak negara, termasuk Indonesia, kita sudah protes keras. Hari ini (kemarin), saya instruksikan Menlu Marty Natalegawa memanggil Dubes RI untuk Australia ke Jakarta, ini langkah diplomasi yang tegas," kata SBY melalui akun pribadinya.

Selain itu, kata dia, Indonesia juga minta Australia memberikan jawaban resmi yang bisa dipahami terkait kasus tersebut. Tindakan Amerika dan Australia sangat mencederai komitmen strategis dengan Indonesia, sesama negara demokrasi.

"Kita akan meninjau kembali sejumlah agenda kerja sama bilateral, akibat perlakuan Australia yang menyakitkan itu. Saya juga menyayangkan pernyataan PM Australia yang menganggap remeh penyesuaan terhadap Indonesia, tanpa rasa bersalah," tandasnya.

Juru Bicara Presiden Julian Aldrin

Pasha menambahkan, Presiden SBY menyayangkan sikap Perdana Menteri Australia Tony Abbott yang tidak memberi klarifikasi dan tidak mau meminta maaf atas penyesuaan itu. Presiden, kata dia, tetap meminta penjelasan Australia.

"Tindakan penyesuaan terhadap kita tidak bisa kita terima. Kita tidak bisa terima tindakan ini atas dasar alasan atau justifikasi apa pun. Oleh sebab itu, Presiden melalui Menlu telah meminta untuk mendapatkan penjelasan yang resmi untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat luas terkait hal ini," kata Julian.

Menlu Marty Natalegawa menyatakan, Indonesia telah mengambil sikap tegas atas kesalahan yang dilakukan Australia. Pemerintah melakukan upaya bertahap sebelum memastikan kelangsungan hubungan diplomasi dengan Australia.

"Seperti kran, satu-satu kita tutup kran, kita kurangi. Hari ini (kemarin) Dubes kita panggil, lalu kita kaji ulang hubungan bilateral. Proses ini akan terus berjalan proses sampai kita mencapai satu titik yang betul-betul bisa kita pastikan," tutur Marty di Istana Merdeka, Jakarta, kemarin.

Apakah Indonesia memberi batas waktu? "Biar mereka yang mengambil kesimpulan. Intinya, kita terus mendorong hubungan dengan Australia, biar pihak mereka yang ambil keputusan," tegas dia.

Marty menegaskan, penyesuaan merupakan tindakan yang tidak dibenarkan dalam hubungan antar negara. Selain merusak hubungan bilateral, tindakan tersebut juga melanggar hukum dan hak asasi manusia. Australia harus bertanggung jawab terkait hal itu.

"Fokus kita adalah penyesuaan, sesuatu yang tidak lazim, melanggar

hukum, melanggar HAM, hak privat seseorang, mencederai, merusak hubungan bilateral Indonesia-Australia. Yang bertanggung jawab hanya satu, yaitu Australia," kata Marty.

Menko Perencanaan Hatta Rajasa menilai aksi penyesuaan yang dilakukan Australia terhadap Indonesia sangat mencederai persahabatan kedua negara.

"Itu menunjukkan bahwa kepercayaan kita kepada sahabat, kepada tetangga dicerderai dengan 'distrust' seperti itu. Australia harus memberi penjelasan secara *clear*," ujar Hatta di Gedung DPR, kemarin.

Hatta mengaku dirinya juga menjadi korban penyesuaan dari pihak Australia. Bahkan hampir semua menteri ikut disadap. "Saya disadap iya. Jadi kalau mesesng disadap, presiden disadap, pembantu dekat presiden disadap, itu sudah masuk ke jantungnya pemerintahan. Jadi *this is very serious*," ujarnya.

Ketua MPR, Sidarto Danusubroto mengancam keras sikap Australia yang menolak meminta maaf atas aksi penyesuaan yang dilakukan kepada Indonesia.

Dengan sikap itu menunjukkan bahwa Australia bukan sahabat Indonesia. Menurutnya, aksi penyesuaan yang dilakukan oleh Australia sama seperti pencurian informasi. Namun sayangnya pemerintah Australia malah menghalalkan aksi tersebut kepada negara sahabatnya.

"Halal atau haram itu dibenarkan sama mereka. Kalau negara ngaku sahabat tapi melakukan tindakan haram ini, ini sangat tidak etis," tegas Sidarto di Gedung DPR, kemarin.

Dia menyambut baik keputusan Pemerintah Indonesia yang menanti Dubesnya dari Australia. Hal ini untuk menunjukkan Indonesia sangat serius terhadap isu tersebut.

Bahkan Sidarto menyamakan kepada Presiden SBY untuk tidak menempatkan Dubesnya di Australia sampai pemerintah Australia menyampaikan klarifikasi dan permintaan maaf kepada Indonesia.

KSAD Siapkan Alat Penangkal Sadap

TNI tidak tinggal diam menyikapi penyesuaan yang dilakukan Australia. Untuk menangkis aksi serupa di masa depan, TNI sedang membuat alat anti sadap yang canggih.

Hal ini diungkapkan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Budifumin. Dia mengklaim, alat ini akan dapat mencegah komunikasi para pejabat Indonesia disadap oleh negara lain.

"Saat ini kami sedang melakukan riset bekerjasama dengan salah satu universitas untuk membuat peralatan anti sadap dan mengembangkan IT teknologi. Kita sudah menandatangani MoU berisi 12 jenis riset," kata Budifumin di Markas Kostrad TNI AD, Cilandak, Depok, kemarin.

Jenderal bintang empat ini mengatakan, pengembangan teknologi anti sadap ini bukan dilatarbelakangi kasus penyesuaan oleh Amerika dan Australia yang belakangan ini berkembang. Pengembangan teknologi antisadap itu, menurutnya, sudah dicanangkan jauh sebelumnya. "Jadi kita sudah melakukan ini jauh sebelum ribut-ribut (soal penyesuaan)," katanya.

Namun, Budifumin enggan berkomentar soal dugaan, Australia sukses melancarkan aksi sadap karena lemahnya alat anti sadap yang dimiliki Indonesia. "Kami banyalah pengembangan teknologi alat anti sadap dan tidak dalam kapasitas untuk mengomentari hal itu," elak-

nya. ■ ONUTIF/NET

Guru Besar UI Yakin, Australia Pake Jurus Ulur Waktu

Jangan Mengira

..... DARI HALAWAN 1

informasi soal terorisme, karena memiliki kepentingan besar dalam hal ini.

Kartu truf kedua, kerja sama soal penanganan imigran gelap yang ingin menuju Negeri Kanguru. "Kalau Indonesia memutuskan hubungan diplomatik, kelabakan dia (Australia)," tegasnya.

Wakil Ketua MPR Lukman Hakim Syaifuddin berpendapat, jika belum juga ada respons positif dari Australia soal ini, sudah saatnya Indonesia lebih tegas. Caranya, dengan mengusir (persona non grata) Dubes Australia di Indonesia.

Persona non grata adalah istilah diplomatik di mana perwakilan negara di negara lain dipulangkan oleh negara tersebut karena adanya hal-hal yang dinilai mengusik hubungan baik kedua negara. "Kami berpandangan bahwa penyadapan tersebut telah melecibekkan kedaulatan bangsa dan negara kita," kata Lukman, kemarin

Ketua Fraksi PDIP, Tjahjo Kumolo, sepakat dengan Lukman Hakim. Tjahjo mengatakan, pemerintah seharusnya juga menyuruh pulang duta Dubes Australia di Indonesia. Setelah itu, lanjutnya, pemerintah harus meminta penjelasan kepada pemerintahan Australia terkait kebenaran penyadapan tersebut.

"Setelah semua jelas *clean and clear*, baru Dubes RI diminta kembali, demikian pula sebaliknya. Kita harus berani tunjukkan Indonesia negara berdaulat, sebagai negara bebas aktif dan saling menjaga dan menghormati etika persahabatan antar negara," jelasnya.

Anggota Komisi I DPR Tantowi Yahya juga meminta pemerintah tegas. Jangan hanya menarik sementara Dubes Kita di Australia. "Kita harapkan penarikan itu tidak hanya sekadar untuk konsultasi, namun penarikan secara permanen sampai dengan ada klarifikasi dan permohonan maaf dari Pemerintah Australia," katanya.

Di jagad Twitter, pemilik akun asal

Indonesia rame-rame mendukung opsi pemutusan hubungan diplomatik. Yang memotret hal ini salah satunya adalah @Yusril_Mhd, akun milik Yusril Izza Mahendra. Begini isi kicauan Yusril yang dibuat pada Senin lalu. "Kalau saya jadi presiden, sudah saya usir Dubes Australia yang salah gunakan fasilitas diplomatik dan remehkan bangsa dan negara ini." Hingga kemarin, kicauan Yusril ini sudah di-retweet sebanyak 285 kali.

Sementara akun lain kebanyakan cukup berkomentar pendek, tapi tegas. "Usir aja baru keren," kicau @IndaYunadi sambil memasukkan berita terkait penyadapan di ekornelainya.

"Usir aja sekalian," kicau @Ahmad Fauzy menanggapi berita DPR akan memanggil Dubes Australia terkait hal ini. @PIJK74 juga tak kalah keras. Dia bilang begini. "Ini penghinaan terhadap negara, usir Dubes Australia," tulisnya sambil me-mention kicauan ini ke akun resmi Presiden SBY, @SBYudhoyono.

Namun Guru Besar Ilmu Politik UI Prof Budiarta meyakini, Indonesia tak akan memutuskan hubungan diplomatik dengan Australia. Sebaliknya, kata dia, Australia akan mengambil opsi sama dan membiarkan isu penyadapan mereda.

"Australia akan mengulur waktu sampai isu ini mereda, begitu pun Indonesia. Tidak akan ada yang mengambil inisiatif untuk memutus hubungan, karena kerja sama yang dibangun saling menguntungkan, khususnya disektor perdagangan," ujar Budiarta saat dihubungi kemarin.

Dalam situasi seperti ini, sambung dia, pemerintah Indonesia harus terus melakukan upaya diplomatik agar Australia mengakui kesalahannya. "Australia sudah lama nggak cocok sama kita. Persahabatan yang mereka bangun semu. Tapi, sudah lah. Yang penting sekarang, bagaimana mereka mengakui kesalahannya dan memohon maaf kepada Indonesia," tegas dia. ■ USU/NET

SBY Buka Isi Surat PM Abbott

Australia Kapok Ganggu Indonesia



BERI KETERANGAN PERS: Presiden SBY berbicara kepada wartawan, menanggapi surat Perdana Menteri Australia Tony Abbott, di Kantor Presiden, Jakarta, kemarin.

Dubes Indonesia Untuk Australia Tetap Di Jakarta

Australia Kapok

..... DARI HALAMAN 1

tralia untuk menjaga dan melanjutkan hubungan bilateral kedua negara. Kedua, komitmen PM Australia bahwa negaranya tidak akan melakukan sesuatu yang akan merugikan dan mengganggu Indonesia di masa depan. Ketiga, PM Australia setuju dan mendukung usulan saya untuk menata kembali kerja sama bilateral," tutur SBY dalam konferensi pers di Istana Negara, Jakarta, kemarin.

Soal kelanjutan kerja sama Indonesia-Australia, Presiden menyatakan, masih ada sejumlah hal yang perlu dilakukan sebelum hubungan kedua ne-

gara pulih kembali.

Ia mengaskan Menlu Marty Natalegawa untuk membahas penataan kembali kerja sama bilateral, termasuk pertukaran intelijen dengan menyusun protokol dan kode etik yang jelas, adil, dan dipatuhi kedua negara.

"Setelah mendiskusikannya dengan Wakil Presiden dan anggota kabinet maka saya menugasi Menlu atau utusan khusus untuk mendiskusikan secara mendalam dan serius termasuk isu-isu yang sensitif hubungan bilateral Indonesia Australia pascapenyadapan," ujar dia.

Setelah kedua negara duduk bersama dan memiliki kesamaan pandangan soal isu penyadapan, sambung dia, Indone-

sia dan Australia membahas kode protokol dan etik untuk kedua negara. Kode protokol dan etik inilah yang menjadi syarat Indonesia bersedia memperbaiki hubungan dengan Australia.

"Setelah protokol dan kode etik itu dibahas, saya ingin pengesahannya dilakukan di hadapan kepala pemerintahan, saya sebagai Presiden dan PM Abbot sebagai Perdana Menteri," tegas dia.

Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha menambahkan, meski Presiden SBY sudah memberi sinyal perbaikan hubungan dengan negeri Kanguru itu. Tapi, duta besar Indonesia untuk Australia tetap berada di Jakarta.

"Step by step ya, dimulai dengan me-

nunjuk seseorang special envoy (utusan khusus), soal dubes (kembali ke Australia) belakangan dulu," ujar Julian di Komplek Istana Presiden, Jakarta, kemarin.

Menurutnya, Dubes Nadjib Riphah Kesoema akan kembali ke Australia setelah semua pembahasan hubungan kedua negara selesai dan disepakati. Hubungan Indonesia-Australia akan dapat kembali normal setelah Australia memenuhi tuntutan dari SBY.

"Normalisasi hubungan kita tergantung dari apa yang kita lakukan berdasarkan dari *code of conduct* dan protokol, jika dianggap telah bisa benar-benar diimplementasikan atau berjalan," tandasnya. ■ ONI

Sadap



JAGAT perpolitikan dunia tengah ramai-ramainya oleh aksi sadap menyadap. Mengapa yang disadap ribut dan tidak bisa menerima dan mengaca harus ada usaha penyadapan? Pasti ada alasan logis dan ada apa-apanya di balik semua. Kalau tidak mana mungkin In era Informatika. Informasi menjadi sepetarukan, utamanya dalam lingkungan intelijen negara, lebih khusus lagi di masa peperangan. Harganya mahal bahkan sudah tidak bisa lagi diukur dengan uang. Hanya nyawa yang setara bisa menebusnya. Berbagai cara dilakukan agar memperoleh informasi apalagi kelasnya super rahasia (*highly classified information*).

Sebuah negara bisa mendadak maju dan menjadi unggul dari yang lainnya lantaran

♦ BERSAMBUNG KE HAL 9

Vox Populi

Sadap

..... DARI HALAMAN 1

sukses menembol informasi super secret negara tetangganya. Bisa jadi karena soal pemetaan informasi lalu memodifikasi untuk kejayaan negaranya, bisa pula membajak informasi untuk bisa mengalahkan lawan karena taba persis di mana titik-titik kelemahannya.

Oleh karena itu tidak mengherankan bila masing-masing negara merasa penting membentuk satuan intelijen yang berfungsi untuk mata-mata pergerakan serta perkembangan ekonomi, politik, gerakan sosial, dan aktivitas kebudayaan. Ditambah lagi saat ini temuan-temuan teknologi di berbagai bidang. Tim ini ditraining khusus dengan biaya mahal sekali namun karena perannya penting sehingga tidak terasa besar.

Selain tim yang tajam mengendus informasi sebuah negara rela mengeluarkan anggaran investasi berupa teknologi penyadapan super canggih. Hanya melacak dengan menčekat saja, itu zaman jadul. Sekarang deng-

an piranti satelit dan kecanggihan radar, dinding penghalang setebal apapun jebol. Alat perekam dari waktu ke waktu semakin sensitif dan tak peduli jarak. Bisa drefhat, mendengar apa yang dibicarakan, termasuk yang rahasia-rahasia.

Selain dunia intelijen negara dan perusahaan besar untuk keperluan bisnis, para pegiat hukum di negeri kita sudah memanfaatkan teknologi sadap untuk menjang dan menangkap angam para pelaku tindak. Seretelah dipunskan menjadi target incaran maka dipasanglah teknologi mata dan telinga aparat kepada target. Tertangkaplah sebagai besar para pencoleng duit rakyat.

Terimakasih para penyadap, yang meribut dunia menjadi serba berbeda. Mereka yang berkuasa merekalah yang kaya raya dan menguasai dunia. Bisnis informasi seperti angin, tak tampak namun terasa betul baunya, menyessakkan atau melapangkan hidung. Mari kita berlomba menguasai informasi untuk kejayaan agam dan negara tercinta. ■